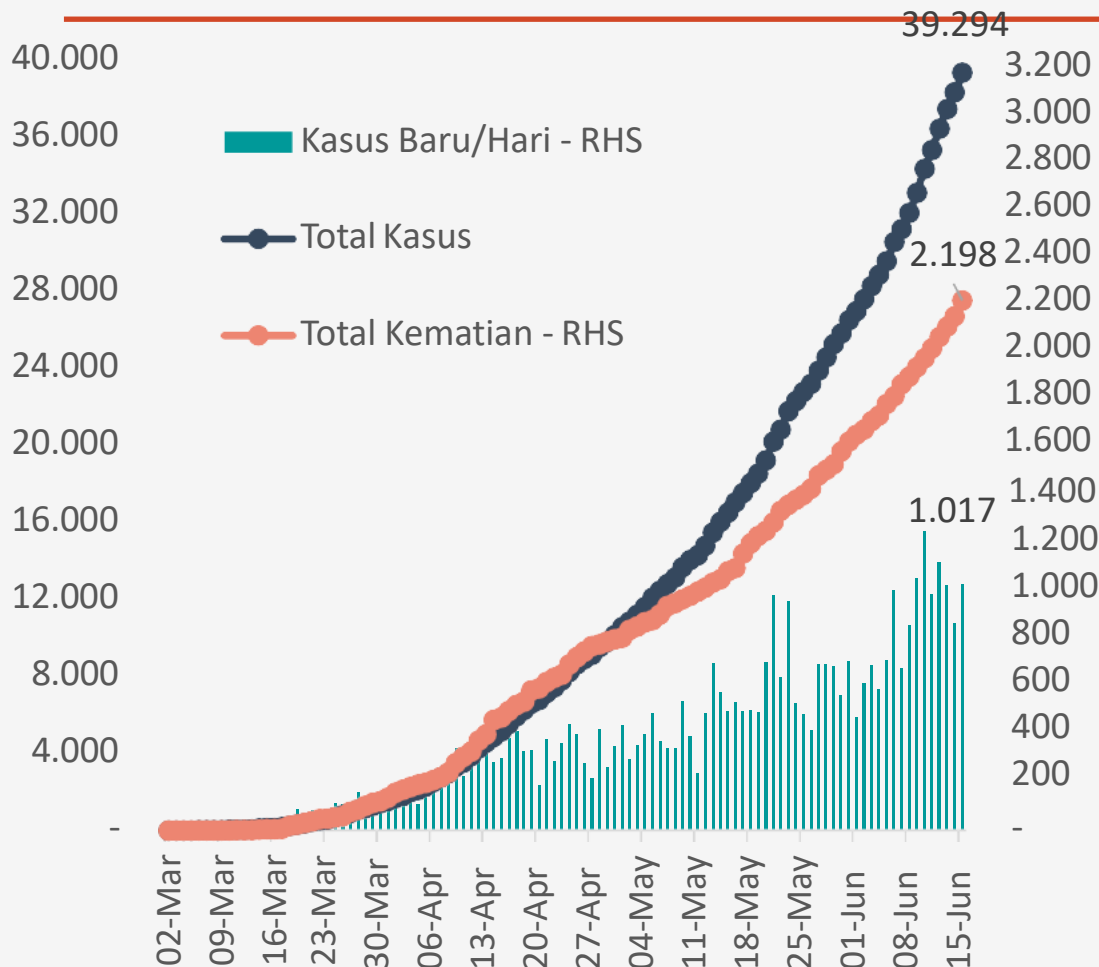


# Pandemi: Tantangan Kebijakan dan Akuntabilitas Anggaran "Ketegangan Pusat-Daerah"

MISBAH HASAN  
Sekjen FITRA

# UPDATE CORONAVIRUS (COVID-19) DI INDONESIA

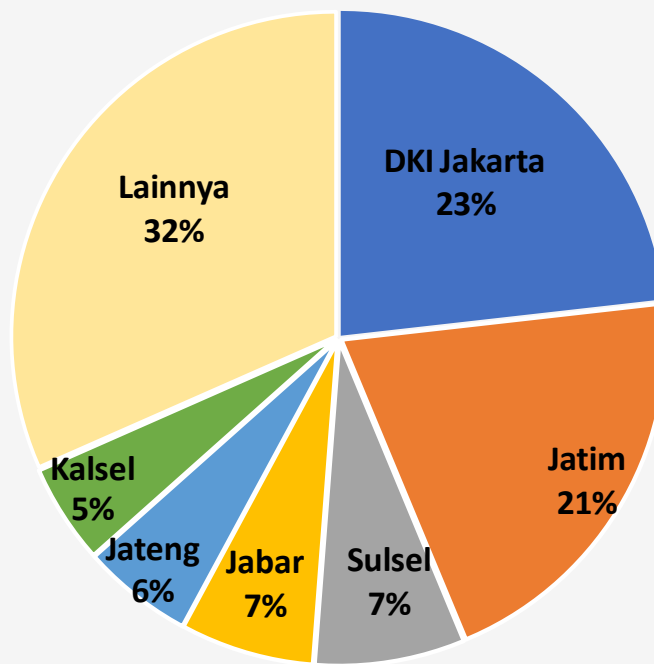
Total Kasus COVID-19 di Indonesia



Jumlah pasien sembuh = 15.123 orang (38% dari total kasus positif)

Sumber: Kementerian Kesehatan RI, data per 15 Juni 2020

Wilayah dengan Kasus COVID-19 Tertinggi di Indonesia per 14 Juni 2020 (persentase thd total)



Episentrum Covid-19 menyebar ke wilayah lain. Kasus di Jakarta bulan lalu 34% dari kasus di Indonesia, saat ini menjadi 23%. Kini Jawa Timur jadi episentrum di Jawa, sementara Sulawesi Selatan jadi episentrum di luar Jawa

Per 15 Juni 20

329.190  
orang sudah dites PCR

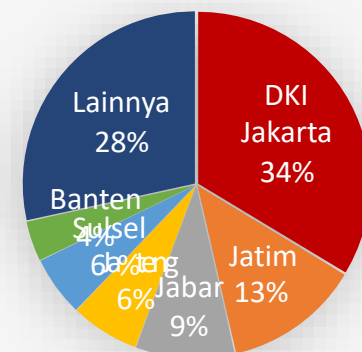
15.123  
pasien sembuh

13.649  
PDP

36.744  
ODP

289.896  
negatif COVID-19

Per 18 Mei 2020



# PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 2020-2021

Realisasi PDB Q1-2020 (% , yoy)		Proyeksi Pemerintah (% ,yoy)	
Konsumsi RT	2,8	2020	-0,4 s.d 2,3
Konsumsi LNPRT	-4,9		
Konsumsi Pemerintah	3,7		
PMTB	1,7	2021	4,5 s.d 5,5
Ekspor	0,2		
Impor	-2,2		
<b>PDB</b>	<b>3,0</b>		

## Asesmen Pertumbuhan Ekonomi 2020-2021

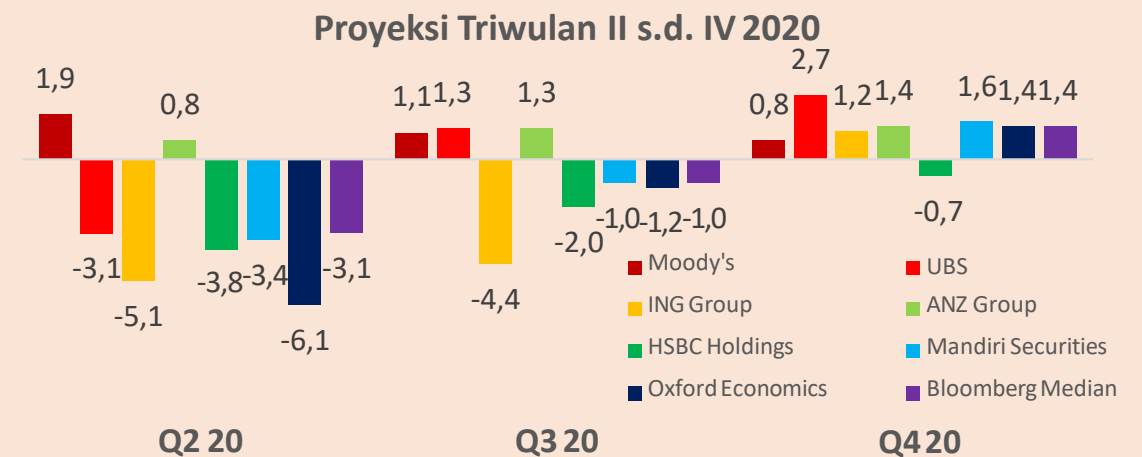
- Rilis Pertumbuhan Q1-2020 menunjukkan tendensi kinerja ekonomi Indonesia **menuju Skenario Sangat Berat (-0,4%)** dengan pertumbuhan terendah (*palung*) di Q2-2020
- Namun hasil asesmen terkini mengindikasikan kinerja triwulan II lebih baik dibanding hasil asesmen sebelumnya (pada Mei 2020), **tumbuh positif di 2020**
- Keberhasilan Program Pemulihan Ekonomi nasional** juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan **ekonomi lebih tinggi**

## UPDATE PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA DARI LEMBAGA INTERNASIONAL & CONSENSUS (% , YOY)

Proyeksi Lembaga-lembaga lain masih menunjukkan perbedaan yang signifikan, mengindikasikan tingginya ketidakpastian

	Proyeksi Pertumbuhan 2020-2021				
	World Bank (Jun)	OECD (Jun)	ADB (Apr)	IMF (Apr)	Bloomberg Median (Jun)
<b>2020</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,9 s.d -2,8</b>	<b>2,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>2021</b>	<b>4,8</b>	<b>2.6 s.d 5,2</b>	<b>5,0</b>	<b>8,2</b>	<b>5,5</b>

Sumber: WB Global Economic Prospect 2020, OECD Economic Outlook 2020, Asian Development Outlook 2020, World Economic Outlook IMF, Bloomberg (diolah)









Sumber: Bloomberg (diolah)

# Kebijakan Anggaran Penanganan Covid-19

---

- 1 Instruksi Presiden No. 4/2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19
- 2 Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara & Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19/dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- 3 Perpres 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA. 2020
- 4 Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran DAK Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19
- 5 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA. 2020 dalam Rangka Penanggulangan Covid-19
- 6 Permendagri No. 20/2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah
- 7 Keputusan Bersama Kemendagri No. 119/2813/SJ & Kemenkeu No. 177/KMK.07/2020 ttg Percepatan Penyesuaian APBD TA. 2020 dlm Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional
- 8 SE Menteri Desa, PDTT No. 8/2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
- 9 SE Mendagri No. 440/2703/SJ/2020 tentang Penanggulangan Dampak Covid-19 di Desa
- 10 SE KIP No. 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Masa Darurat Kesehatan
- 11 SE KPK No. 8/2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan PBJ dalam Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
- 12 PMK No. 38/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19 dan/atau Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

# Indikator Makro Ekonomi : Pertumbuhan Ekonomi Terjun Bebas ..

		APBN	Perpres 54/2020	Realisasi s.d April	Outlook
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	2,3	2,97 <sup>1)</sup>	-0,4 – 2,3
	Inflasi (% yoy)  (%, ytd))	3,1	3,9	2,67  0,84	2,0 – 4,0
	Nilai Tukar (Rp/USD)	14.400	17.500	14.642 <sup>2)</sup>	14.900 - 15.500
	Harga Minyak (US\$/barrel)	63	38	46 <sup>3)</sup>	30 - 35
	Lifting Minyak (ribu barrel/hari)	775	735	702 <sup>4)</sup>	695 - 725
	Lifting Gas (ribu barrel/hari)	1.191	1.064	1.036,1 <sup>4)</sup>	990 - 1050

# Outlook APBN 2020: Defisit Besar (>6.27%)

	<b>Perpres 54/2020</b>	<b>Outlook</b>
<b>Pendapatan Negara</b>	<b>1.760,9</b>	<b>1.691,6</b>
Perpajakan	1.462,6	1.404,5
PNBP	297,8	286,6
<b>Belanja Negara</b>	<b>2.613,8</b>	<b>2.720,1</b>
Belanja Pem. Pusat	1.851,1	1.959,4
TKDD	762,7	760,7
<b>Defisit (% PDB)</b>	<b>(852,9) (5,07)</b>	<b>(1.028,5) (6,27)</b>
<b>Pembiayaan Anggaran</b>	<b>852,9</b>	<b>1.028,5</b>

## Pendapatan Negara lebih rendah Rp69,3T (kontraksi 13,6%)

- Perpajakan kontraksi 9,2%
- PNBP kontraksi 29,6%

## Belanja Negara lebih tinggi Rp106,3 T antara lain:

- Penghematan Belanja K/L Rp 50 T
- Penghematan belanja pegawai (THR dan Gaji13) Rp12,4 T
- Tambahan kompensasi Rp76,08 T (PLN: Rp38,25 T Pertamina Rp37,83 T sehingga total untuk PLN Rp45,42 T dan Pertamina Rp45,0 T)
- Tambahan stimulus fiskal antara lain:
  - Subsidi bunga UMKM (termasuk UMI) Rp34,2 T
  - Diskon tarif listrik menjadi 6 bulan Rp3,5 T
  - Bansos tunai dan sembako s.d Des Rp19,62 T (@Rp300rb/bln)
  - Cadangan stimulus Rp60,0 T (tambahan belanja Rp40,7 T dan realokasi dari dana stimulus yang tidak terpakai)

## Pembiayaan Anggaran lebih tinggi, memperhitungkan a.l.:

- Pembiayaan investasi Rp25,27 T dalam kerangka PEN
- Tambahan pembiayaan untuk mengakomodasi pelebaran defisit dari 5,07% menjadi 6,27% PDB

## PENANGANAN COVID DAN PEMULIHAN EKONOMI

Pemerintah memberikan dukungan stimulus untuk mengurangi dampak terhadap perekonomian dan kesejahteraan rakyat

### PANDEMI COVID-19 MEMBERIKAN EFEK PADA SELURUH ASPEK KEHIDUPAN



Kesehatan Sosial Ekonomi Keuangan

### BERDAMPAK PADA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN/PENGANGGURAN

Pertumbuhan Ekonomi **-0,4% s.d. 2,3%**

Kemiskinan (jt org) **+1,89 s.d. +4,86**

Pengangguran (jt org) **+2,92 s.d. +5,23**

### BIAYA PENANGANAN COVID-19 (Rp695,20 T)

Kesehatan

**Rp87,55 T**

Perlindungan Sosial

**Rp203,90T**

Insentif Usaha

**Rp120,61T**

UMKM

**Rp123,46 T**

Pembiayaan Korporasi

**Rp53,57 T**

Sektoral K/L & Pemda

**Rp106,11 T**

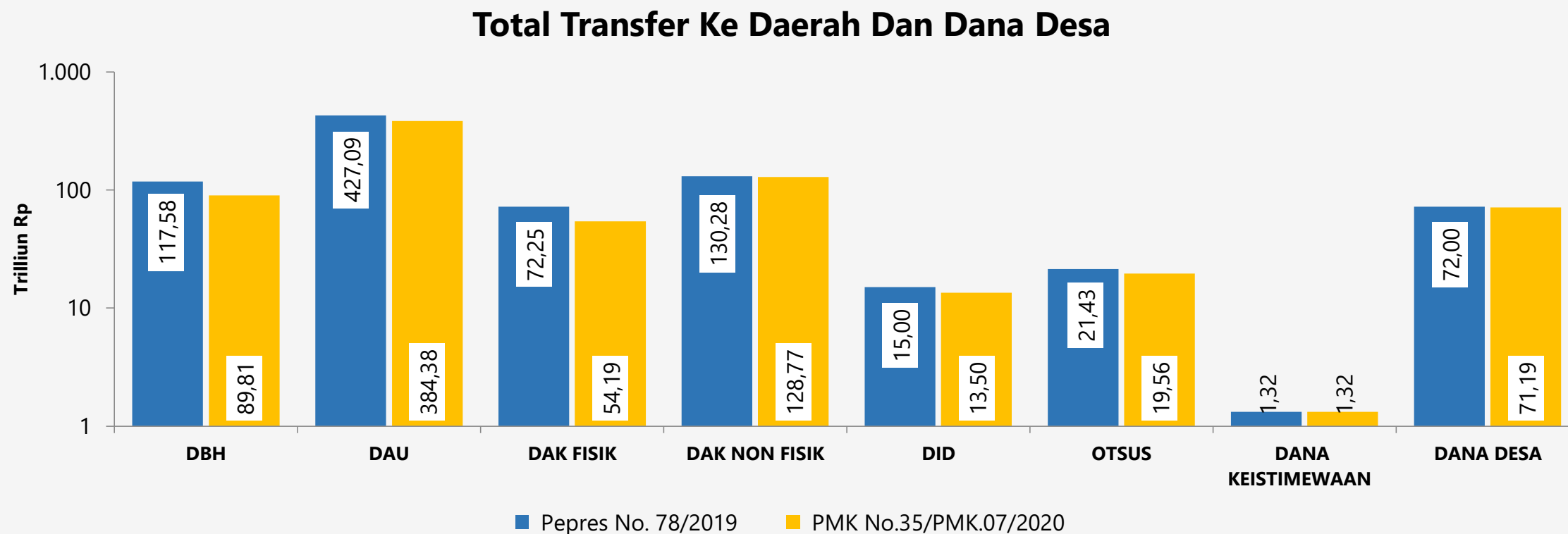


# Rekap Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Instrumen Kebijakan	Penerima Akhir	Total
<b>I. Dukungan Konsumsi</b> PKH (Rp37,4T), Sembako (Rp43,6T), Bansos Jabodetabek (Rp6,8T), Bansos Non-Jabodetabek (Rp32,4T), Pra Kerja (Rp20T), Diskon Listrik (Rp6,9T), Logistik/Pangan/Sembako (Rp25T)	RT Miskin dan Rentan serta Terdampak	<b>172,10</b>
<b>II. Subsidi Bunga</b> BPR, Perbankan, dan Perusahaan Pembiayaan (Rp27,26T), KUR, UMi, Mekaar, dan Pegadaian (Rp6,4T), dan UMKM Online, LPDB, Koperasi, dll (Rp0,49T)	UMKM, Dunia Usaha, Masyarakat	<b>34,15</b>
<b>III. Insentif Perpajakan</b> PPh 21 DTP (Rp39,66T), PPh Final UMKM DTP (Rp2,4T), Pembebasan PPh 22 Impor (Rp14,75T), Pengurangan Angsuran PPh 25 (Rp14,4T), Pengembalian Pendahuluan PPN (5,8T), Penurunan Tarif PPh Badan (Rp20T), Cadangan dan Stimulus Lainnya (Rp26T)	UMKM, Dunia Usaha, Masyarakat	<b>123,01</b>
<b>IV. Subsidi BBN dalam rangka B-30</b>	BLU	<b>2,78</b>
<b>V. Percepatan Pembayaran Kompensasi</b> Pertamina (Rp45T) dan PLN (Rp45,42T)	BUMN, Masyarakat	<b>90,42</b>
<b>VI. Tambahan Belanja K/L dan Sektor</b> Pariwisata (Rp3,8T), Perumahan (Rp1,3T), dan Cadangan Stimulus Fiskal Lainnya (Rp60T)	Masyarakat	<b>65,10</b>
<b>VII. Dukungan untuk Pemda</b> Cadangan DAK Fisik (Rp9,1T), DID Pemulihan Ekonomi (Rp5T), dan Penyediaan Fasilitas Pinjaman ke Daerah (Rp1T)	Masyarakat	<b>15,10</b>
<b>VIII. Penjaminan untuk Kredit Modal Kerja Baru bagi UMKM</b> Belanja IJP (Rp5T) dan cadangan penjaminan (Rp1T)	UMKM	<b>6,00</b>
<b>IX. PMN</b> PLN (Rp5T), HK (Rp11T), BPUI* (Rp6,27T), PNM (Rp2,5T), dan ITDC (Rp0,5T)	BUMN	<b>25,27</b>
<b>X. Talangan (Investasi) untuk Modal Kerja</b> PT Garuda (Rp8,5T), Perumnas (Rp0,65T), KAI (Rp3,5T), PTPN (Rp4,0T), dan KS (Rp3T)	BUMN	<b>19,65</b>
<b>XI. Penempatan Dana Pemerintah di Perbankan dalam rangka restrukturisasi kredit UMKM</b>	Perbankan	<b>87,59**</b>
<b>Total</b>		<b>641,17</b>



Transfer ke Daerah dan DD berkurang hingga -Rp94,2 Triliun (-12% dari Total TKDD 2020) ...

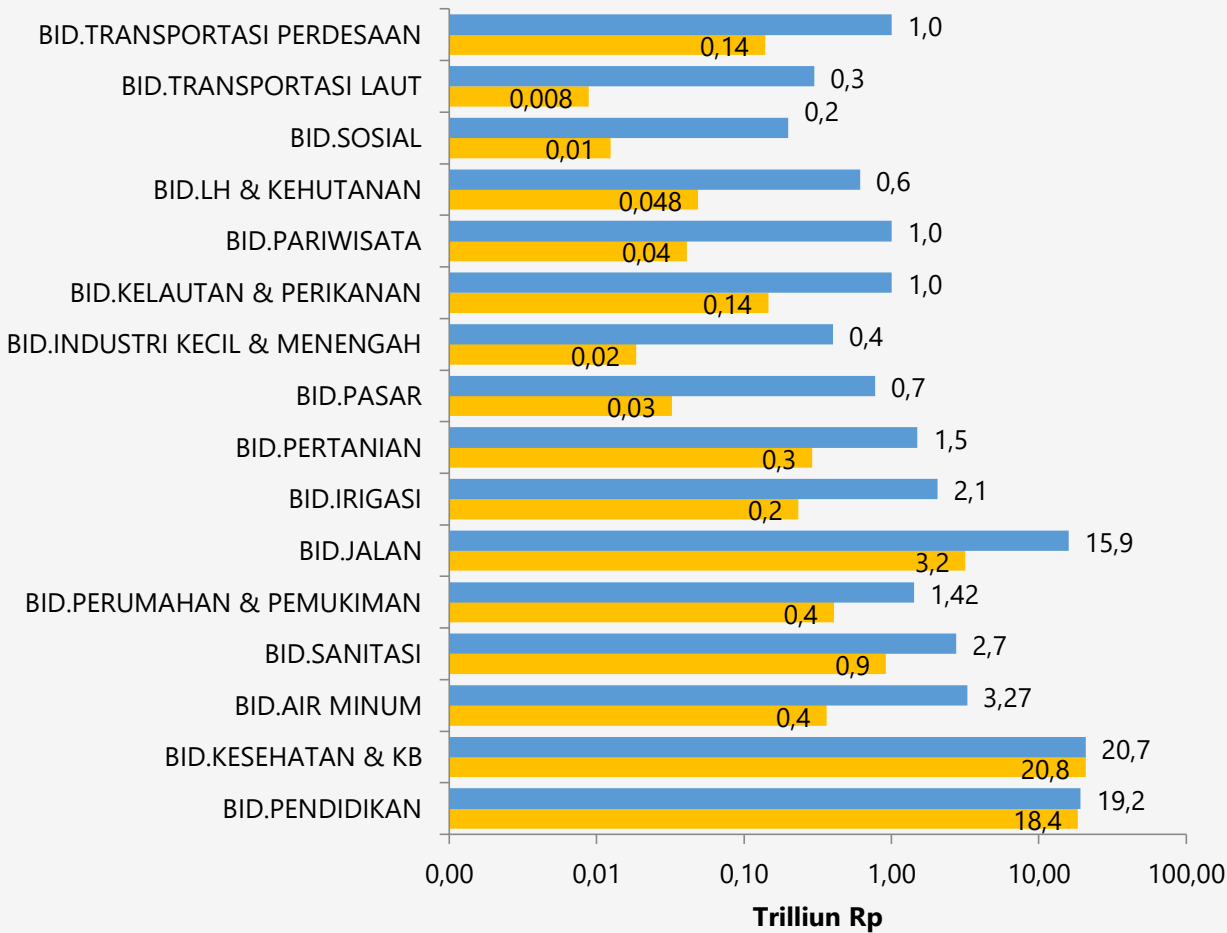


- Secara nominal, penurunan terbesar pada transfer DAU hingga -Rp42,71 Triliun, DBH -Rp27,76 Triliun, dan DAK Fisik -Rp18,06 Triliun;
- Namun secara persentase, penurunan terbesar pada DAK Fisik (-33%), DBH (-31%), dan DAU (-11%).

# DAK Fisik Bidang Kesehatan Rp20,8 Triliun & DAK Non-Fisik BOK/BOK Tambahan Rp13,4 Triliun ...

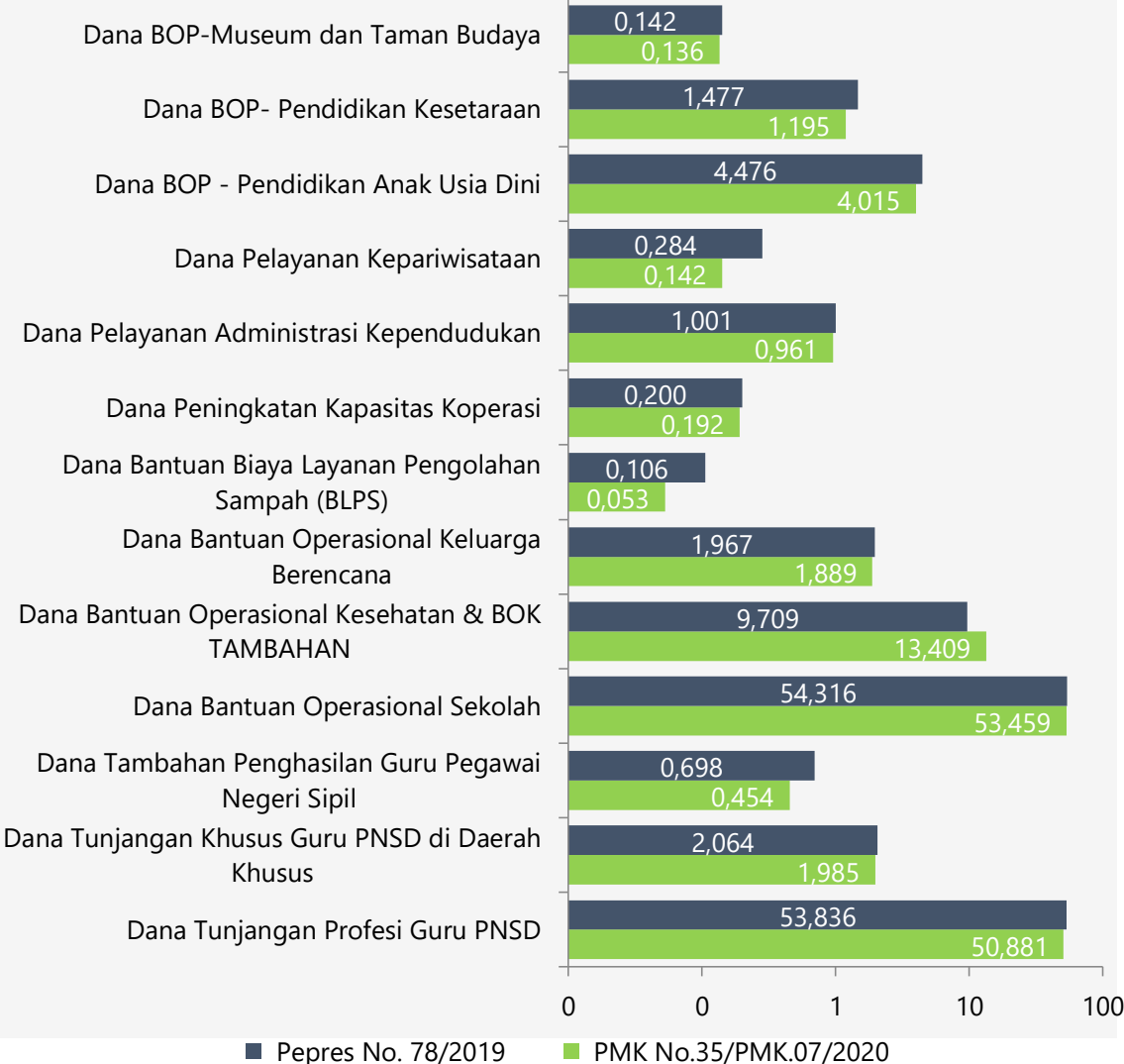
## DAK FISIK

(DAK Reguler, DAK Penugasan, dan DAK Afirmasi)



■ Pepres No. 78/2019 ■ PMK No.35/PMK.07/2020

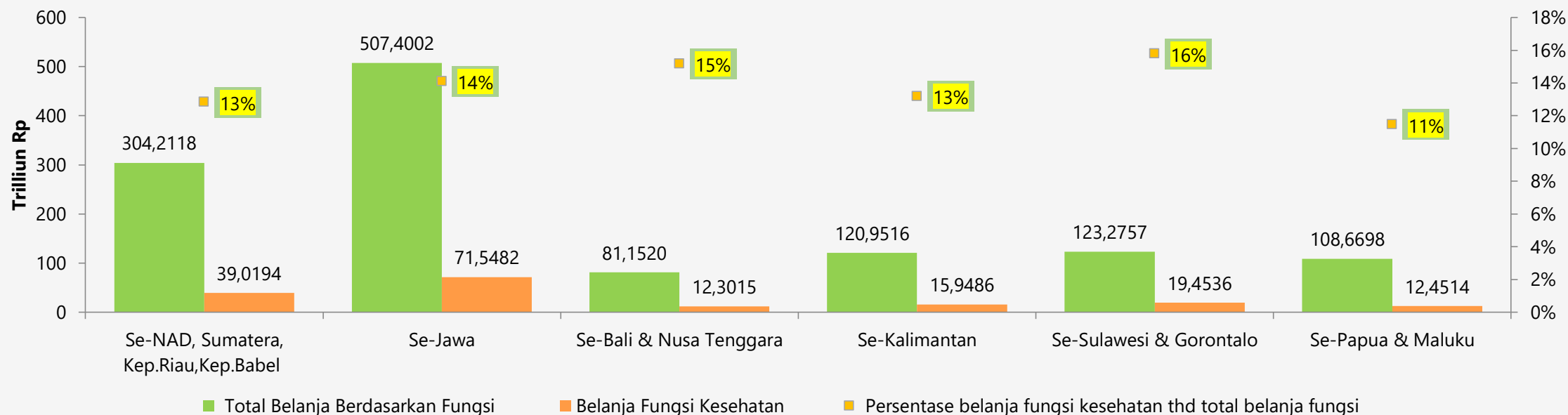
## Alokasi DAK Non Fisik



■ Pepres No. 78/2019 ■ PMK No.35/PMK.07/2020

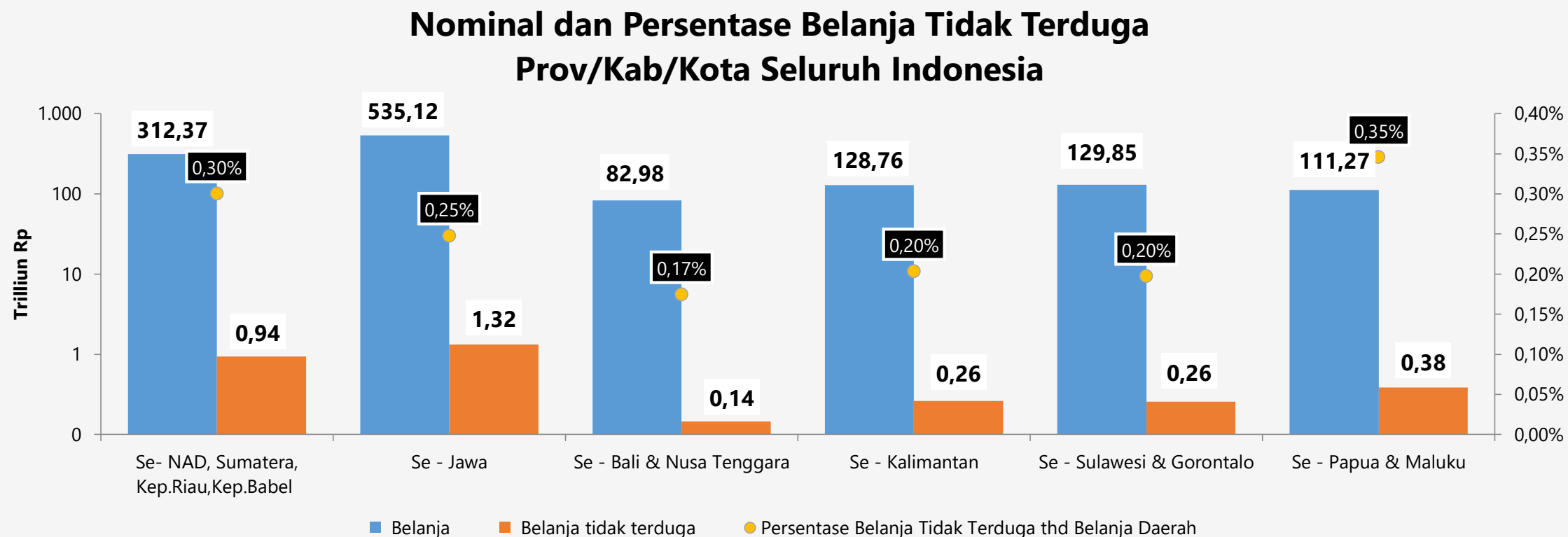
# Potret Anggaran Fungsi Kesehatan Per Wilayah ...

## Belanja Fungsi Kesehatan Pemerintah Daerah (Prov, Kab, Kota) se-Indonesia Tahun 2019



- Seluruh wilayah di Indonesia telah memenuhi mandatori UU Kesehatan terkait besaran alokasi anggaran untuk Fungsi Kesehatan di atas 10 persen;
- Selain untuk penanganan covid-19, anggaran Fungsi Kesehatan harus diarahkan untuk menyelesaikan persoalan kesehatan lain, seperti stunting, AKI/AKB, germas, dan pencegahan dan pengendalian penyakit menular sesuai prioritas daerah masing-masing.

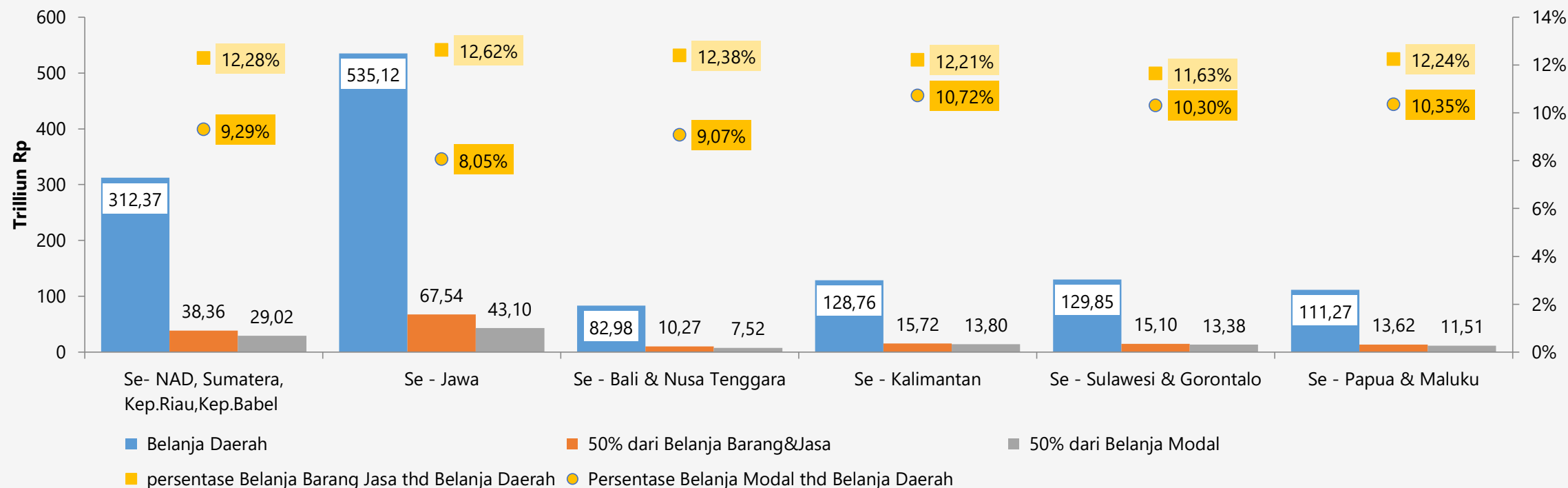
# Potret Belanja Tidak Terduga 2020 ..



- Total Belanja Tidak Terduga (BTT) Provinsi/Kab/Kota se Indonesia sebesar Rp3,3 Triliun;
- Persentase BTT rata-rata hanya 0,2% dari total Belanja Daerah provinsi/Kab/kota seluruh Indonesia;
- Meski Indonesia termasuk wilayah rawan bencana (bencana alam & bencana non-alam), alokasi BTT (dana kedaruratan/kebencanaan) tiap tahun sangat kecil.

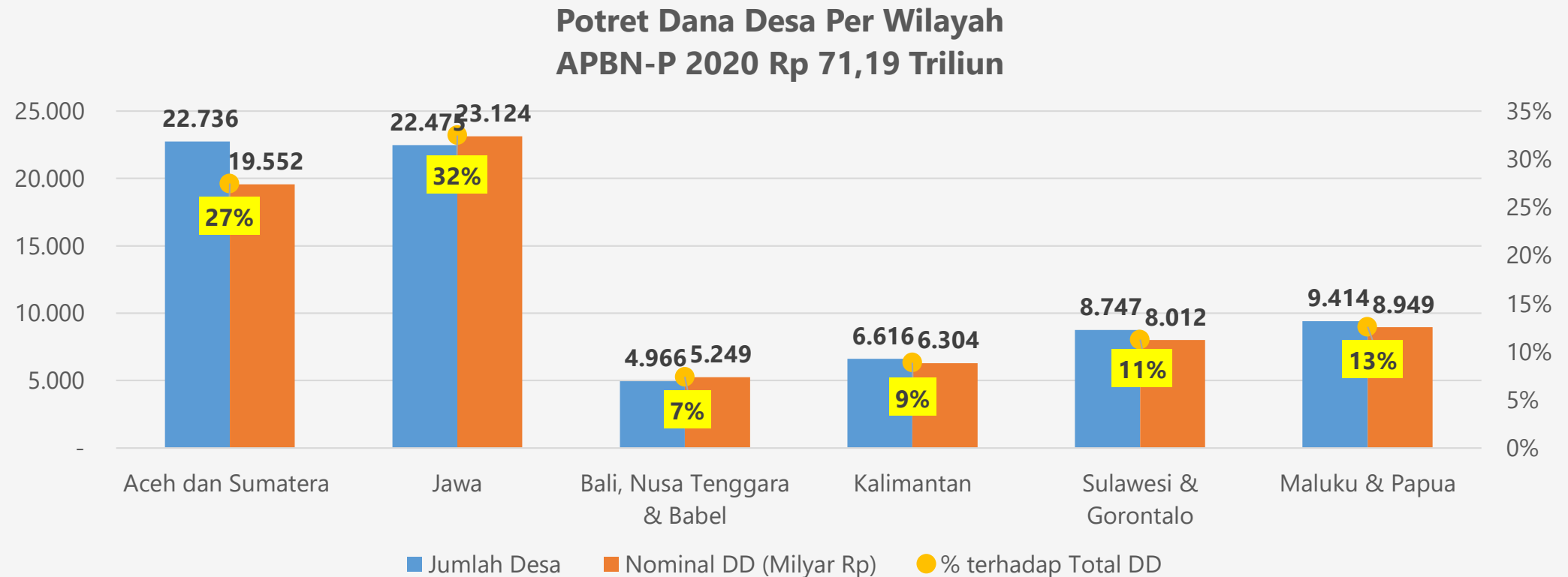
# Perhitungan Realokasi Anggaran berdasarkan Keputusan Bersama Mendagri No. 119/2813/SJ/2020 dan Menkeu No. 177/KMK.07/2020 ...

## Asumsi Realokasi APBD Skema 50% dari Belanja Barang&Jasa Dan Belanja Modal Seluruh Pemda di Indonesia



- Potensi realokasi APBD dengan skema 50% Belanja Barang/Jasa Rp160,61 Triliun dan 50% Belanja Modal Rp118,33 Triliun, atau total Rp278,94 Triliun;
- Hingga saat ini baru terkumpul Rp 85 Triliun dari Realokasi APBD seluruh Indonesia (94% daerah)

# Potret Dana Desa 2020



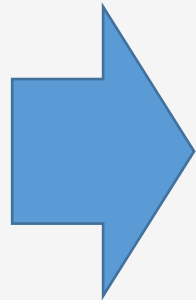
- Total Dana Desa dalam APBN-P 2020 sebesar Rp 71,19 Triliun untuk 74.954 Desa;
- Rata-rata DD Per Desa di Wilayah: Aceh & Sumatera Rp859.957.776,-; Jawa Rp1.032.880.979,-; Bali-Nusa Tenggara-Babel Rp1.093.233.991,-; Kalimantan Rp952.841.596,-; Sulawesi & Gorontalo Rp915.971.190,-; dan Maluku-Papua Rp950.605.481.



## Pengawasan Skema Realokasi Dana Desa untuk BLT

---

Memastikan  
Realokasi  
Sesuai  
Mandatori



1. Desa penerima DD kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-DD maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah DD
2. Desa penerima DD antara Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-DD maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah DD.
3. Desa penerima DD lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-DD maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah DD.

# REALISASI APBN S.D. 31 MEI 2020

Sumber: Kemenkeu, 16 Juni 2020

Pendapatan Negara dan belanja Negara mengalami pertumbuhan negatif dibanding tahun lalu, sedangkan Defisit mengalami peningkatan secara nominal maupun rasio terhadap PDB lebih tinggi dibanding 3 tahun terakhir

Uraian (triliun rupiah)	2018			2019				2020			
	Realisasi s.d. 31 Mei	%thd LKPP	Growth (%)	LKPP Unaudited	Realisasi s.d. 31 Mei	%thd LKPP	Growth (%)	Perubahan APBN (Perpres 54/2020)	Realisasi s.d. 31 Mei	%thd Perubahan APBN	Growth (%)
<b>A. Pendapatan Negara</b>	<b>686,0</b>	<b>35,3</b>	<b>15,5</b>	<b>1.958,6</b>	<b>730,1</b>	<b>37,3</b>	<b>6,4</b>	<b>1.760,9</b>	<b>664,3</b>	<b>37,7</b>	<b>(9,0)</b>
<b>I. Pendapatan Dalam Negeri</b>	<b>684,5</b>	<b>35,5</b>	<b>15,3</b>	<b>1.953,3</b>	<b>729,7</b>	<b>37,4</b>	<b>6,6</b>	<b>1.760,4</b>	<b>663,1</b>	<b>37,7</b>	<b>(9,1)</b>
1. Penerimaan Perpajakan	538,7	35,5	14,5	1.546,1	571,2	36,9	6,0	1.462,6	526,2	36,0	(7,9)
<b>Tax Ratio % (arti luas)</b>	<b>3,98</b>			<b>10,69</b>	<b>4,00</b>			<b>9,14</b>	<b>3,50</b>		
a. Pendapatan DJP (Include Pph Migas)	484,9	36,9	14,2	1.332,7	498,5	37,4	2,8	1.254,1	444,6	35,4	(10,8)
b. Pendapatan DJBC	53,8	26,2	17,4	213,5	72,7	34,0	35,1	208,5	81,7	39,2	12,4
2. PNBPN	145,9	35,6	18,1	407,1	158,5	38,9	8,6	297,8	136,9	46,0	(13,6)
<b>II. Penerimaan Hibah</b>	<b>1,4</b>	<b>9,3</b>	<b>580,5</b>	<b>5,4</b>	<b>0,5</b>	<b>9,2</b>	<b>(66,0)</b>	<b>0,5</b>	<b>1,2</b>	<b>240,2</b>	<b>143,7</b>
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>779,5</b>	<b>35,2</b>	<b>7,9</b>	<b>2.304,3</b>	<b>855,9</b>	<b>37,1</b>	<b>9,8</b>	<b>2.613,8</b>	<b>843,9</b>	<b>32,3</b>	<b>(1,4)</b>
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>458,0</b>	<b>31,5</b>	<b>18,0</b>	<b>1.493,2</b>	<b>530,8</b>	<b>35,6</b>	<b>15,9</b>	<b>1.851,1</b>	<b>537,3</b>	<b>29,0</b>	<b>1,2</b>
1. Belanja K/L	231,5	27,3	19,9	870,3	288,2	33,1	24,5	836,5	270,4	32,3	(6,2)
2. Belanja Non K/L	226,5	37,2	16,2	622,9	242,6	38,9	7,1	1.014,6	267,0	26,3	10,1
<b>II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa</b>	<b>321,5</b>	<b>42,4</b>	<b>(4,0)</b>	<b>811,1</b>	<b>325,1</b>	<b>40,1</b>	<b>1,1</b>	<b>762,7</b>	<b>306,6</b>	<b>40,2</b>	<b>(5,7)</b>
1. Transfer Ke Daerah	300,8	43,1	(1,9)	741,3	304,7	41,1	1,3	691,5	277,7	40,2	(8,8)
2. Dana Desa	20,7	34,5	(26,7)	69,8	20,4	29,3	(1,1)	71,2	28,9	40,6	41,3
<b>C. Keseimbangan Primer</b>	<b>19,0</b>	<b>(164,9)</b>	<b>(163,5)</b>	<b>(70,1)</b>	<b>1,3</b>	<b>(1,9)</b>	<b>(93,1)</b>	<b>(517,8)</b>	<b>(33,9)</b>	<b>6,6</b>	<b>(2.710,4)</b>
<b>D. Defisit</b>	<b>(93,5)</b>	<b>34,7</b>	<b>(27,3)</b>	<b>(345,6)</b>	<b>(125,8)</b>	<b>36,4</b>	<b>34,5</b>	<b>(852,9)</b>	<b>(179,6)</b>	<b>21,1</b>	<b>42,8</b>
<b>% Defisit thd PDB</b>	<b>(0,63)</b>			<b>(2,18)</b>	<b>(0,79)</b>			<b>(5,07)</b>	<b>(1,10)</b>		
<b>E. Pembiayaan Anggaran</b>	<b>179,4</b>	<b>58,7</b>	<b>(8,3)</b>	<b>398,9</b>	<b>159,9</b>	<b>40,1</b>	<b>(10,9)</b>	<b>852,9</b>	<b>356,1</b>	<b>41,7</b>	<b>122,6</b>
<b>SiLPA/SiKPA</b>	<b>85,9</b>			<b>-</b>	<b>34,1</b>			<b>-</b>	<b>176,4</b>		

Beberapa jenis Transfer ke Daerah tumbuh negatif seiring perubahan pagu yang menyesuaikan dengan turunnya proyeksi penerimaan sesuai Perpres 54/2020

TKDD (triliun rupiah)	2018			2019				2020			
	Realisasi s.d. 31 Mei	%thd LKPP	Growth (%)	LKPP Unaudited	Realisasi s.d. 31 Mei	%thd LKPP Unaudited	Growth (%)	Perubahan APBN (Perpres 54/2020)	Realisasi s.d. 31 Mei	%thd Perubahan APBN	Growth (%)
<b>1. Transfer ke Daerah</b>	<b>300,8</b>	<b>43,1</b>	<b>(1,9)</b>	<b>741,3</b>	<b>304,7</b>	<b>41,1</b>	<b>1,3</b>	<b>691,5</b>	<b>277,7</b>	<b>40,2</b>	<b>(8,8)</b>
<b>a. Dana Perimbangan</b>	<b>289,8</b>	<b>43,3</b>	<b>(2,0)</b>	<b>709,4</b>	<b>297,3</b>	<b>41,9</b>	<b>2,6</b>	<b>657,2</b>	<b>274,3</b>	<b>41,7</b>	<b>(7,7)</b>
<b>- Dana Transfer Umum</b>	<b>233,4</b>	<b>47,1</b>	<b>1,4</b>	<b>524,9</b>	<b>242,1</b>	<b>46,1</b>	<b>3,7</b>	<b>474,2</b>	<b>222,3</b>	<b>46,9</b>	<b>(8,2)</b>
1) DBH	33,2	35,4	8,8	104,0	33,2	31,9	(0,0)	89,8	31,5	35,0	(5,2)
2) DAU	200,2	49,9	0,3	420,9	208,9	49,6	4,3	384,4	190,9	49,7	(8,6)
<b>- Dana Transfer Khusus</b>	<b>56,3</b>	<b>32,5</b>	<b>(13,8)</b>	<b>184,5</b>	<b>55,3</b>	<b>30,0</b>	<b>(1,9)</b>	<b>183,0</b>	<b>52,0</b>	<b>28,4</b>	<b>(5,9)</b>
1) DAK Fisik	4,2	7,3	(75,6)	64,2	2,3	3,6	(45,2)	54,2	2,9	5,3	-
2) DAK Nonfisik	52,1	45,2	8,7	120,4	52,9	44,0	1,6	128,8	49,1	38,2	(7,2)
<b>b. DID</b>	<b>4,3</b>	<b>51,6</b>	<b>(5,1)</b>	<b>9,7</b>	<b>5,2</b>	<b>53,4</b>	<b>21,8</b>	<b>13,5</b>	<b>3,2</b>	<b>23,8</b>	<b>(37,9)</b>
<b>c. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY</b>	<b>6,8</b>	<b>32,4</b>	<b>4,8</b>	<b>22,2</b>	<b>2,1</b>	<b>9,7</b>	<b>(68,5)</b>	<b>20,9</b>	<b>0,2</b>	<b>0,9</b>	<b>(90,8)</b>
<b>2. Dana Desa</b>	<b>20,7</b>	<b>34,5</b>	<b>(26,7)</b>	<b>69,8</b>	<b>20,4</b>	<b>29,3</b>	<b>(1,1)</b>	<b>71,2</b>	<b>28,9</b>	<b>40,6</b>	<b>41,3</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>321,5</b>	<b>42,4</b>	<b>(4,0)</b>	<b>811,1</b>	<b>325,1</b>	<b>40,1</b>	<b>1,1</b>	<b>762,7</b>	<b>306,6</b>	<b>40,2</b>	<b>(5,7)</b>

- Pagu alokasi DBH lebih rendah 16% dari tahun lalu sedangkan pagu alokasi DAU lebih rendah 8 % dari tahun lalu
- Realisasi DAK Fisik naik; Daerah terdorong menyelesaikan data kontrak sebelum dilakukannya penyesuaian pagu alokasi DAK Fisik.
- Realisasi DAK Nonfisik turun; perubahan penyaluran BOS dan penurunan pagu TPG, Tamsil, TKG.
- Mulai TA 2020 penyaluran Dana Desa di transfer langsung dari RKUN ke RKD (Rekening Kas Desa). Per 20 Mei, penyaluran Dana Desa tahap I dan Tahap II diberikan relaksasi persyaratan penyaluran sesuai PMK 50 Tahun 2020

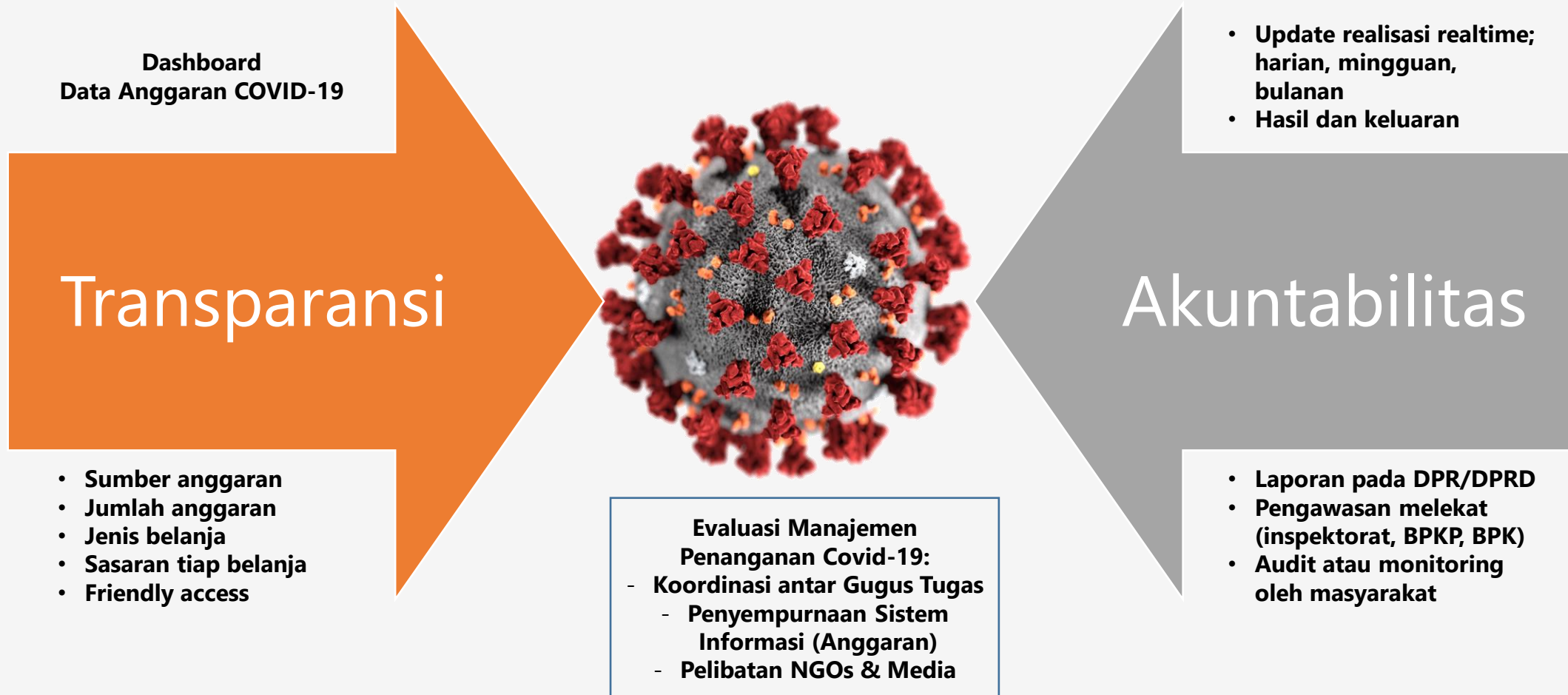
## Tantangan berikutnya, Penundaan DAU

Daerah	TOTAL DAU	ESTIMASI DAU PER BULAN	Penundaan DBH/DAU berdasarkan KMK No.10/KM.07/2020		TOTAL DAU PER BULAN SETELAH PEMOTONGAN
			%	BESARAN PEMOTONGAN per bulan	
Provinsi Sumatera Barat	1.901.922.227,00	158.493.518,92	35%	55.472.731,62	103.020.787,30
Kab. Limapuluh Kota	702.365.062,00	58.530.421,83	35%	20.485.647,64	38.044.774,19
Kab. Padang Pariaman	722.635.928,00	60.219.660,67	35%	21.076.881,23	39.142.779,43
Kab. Pasaman	561.308.754,00	46.775.729,50	35%	16.371.505,33	30.404.224,18
Kab. Pesisir Selatan	792.358.743,00	66.029.895,25	35%	23.110.463,34	42.919.431,91
Kab. Sijunjung	513.243.250,00	42.770.270,83	35%	14.969.594,79	27.800.676,04
Kab. Solok	668.243.259,00	55.686.938,25	35%	19.490.428,39	36.196.509,86
Kab. Tanah Datar	651.739.765,00	54.311.647,08	35%	19.009.076,48	35.302.570,60
Kota Padang Panjang	354.367.009,00	29.530.584,08	35%	10.335.704,43	19.194.879,65
Kota Sawahlunto	349.197.280,00	29.099.773,33	35%	10.184.920,67	18.914.852,67
Kota Pariaman	391.516.784,00	32.626.398,67	35%	11.419.239,53	21.207.159,13

- Penundaan DAU yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan karena Daerah terlambat dalam melakukan penyesuaian APBD untuk Penanganan Covid-19 atau penyesuaian APBD tidak sesuai ketentuan regulasi;
- Efek penundaan DAU di tengah melambatkan pendapatan daerah dari PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dikhawatirkan akan mempengaruhi optimalisasi pelayanan publik daerah.

# Rekomendasi

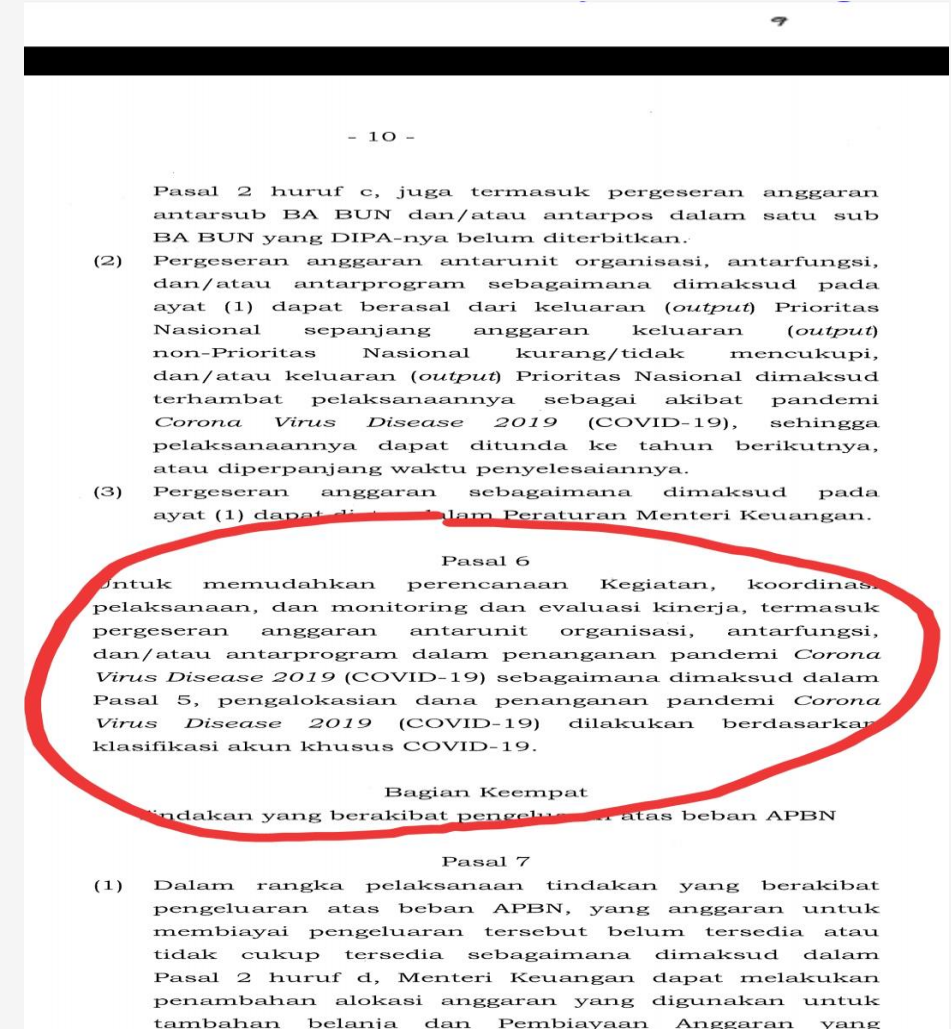
## Revitalisasi Tata Kelola Anggaran Anggaran Covid-19



# Terkait Transparansi

## Pentingnya Laman Transparansi Informasi Anggaran Covid-19 (Budget Line Item)

1. Menghindari tumpang tindih program antar K/L, Pemda, Desa;
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi program penanganan Covid-19;
3. Perlunya kode account klasifikasi program tersendiri untuk memudahkan konsolidasi anggaran dan yang dialokasikan dan dibelanjakan;
4. Memuat informasi anggaran penanganan Covid/19 di berbagai instansi dan level pemerintahan, serta realisasinya secara periodik.





## 5 Alasan Pentingnya Akuntabilitas Anggaran Covid-19

---

1. Penting disaat krisis untuk meningkatkan kepercayaan warga terhadap Langkah-Langkah yang diambil pemerintah;
2. Menelusuri rencana dan pelaksanaan untuk mengetahui kemajuan Langkah-Langkah yang ditempuh;
3. Mengidentifikasi keberlanjutan dan penanda potensi resiko fiskal;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran yang telah dialokasikan;
5. Mencegah atau mendekteksi potensi korupsi dan *mismanagement*.